

TAJUK RENCANA

Perketat Pengawasan PTM 100 Persen

SEIRING terus menurunnya kasus Covid-19, khususnya di DIY, pengelola pendidikan kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) karena dinilai lebih efektif. Namun bagi sekolah yang belum mampu menyelenggarakan PTM 100 persen karena berbagai alasan, misalnya masih banyak guru yang belum mendapatkan vaksin booster, diminta untuk tidak memaksakan diri.

Turunnya kasus Covid-19 di DIY memang patut disyukuri, meski sebenarnya dibanding wilayah lain DIY masih tergolong tinggi angka kasusnya, serta jumlah kematian rata-rata masih di atas 10 orang perhari. Meski begitu, pelanggaran diterapkan di hampir semua sektor, terutama pariwisata dan pendidikan. Karena itu penerapan PTM 100 persen merupakan respons yang dianggap realistis atas kondisi Covid-19 di DIY yang relatif melandai.

Namun kita mengingatkan, pemberlakuan PTM 100 persen hendaknya tidak hanya didasarkan atas kondisi jumlah kasus Covid-19 yang terus menurun, melainkan harus didasarkan pada kondisi riil sekolah yang bersangkutan, apakah memang telah siap menjalankan PTM 100 atau tidak. Sebab, pada akhirnya kebijakan PTM 100 persen diserahkan pada sekolah masing-masing.

Sekadar mengingatkan, keselamatan anak-anak adalah hal paling utama untuk diprioritaskan. Karenanya, walaupun sekolah sudah merasa siap untuk menggelar PTM 100 persen, konsekuensinya proses harus diperketat. Dalam kaitan itu, kerja sama antara guru, siswa dan orangtua sangat diperlukan guna mencegah penyebaran Covid-19. Sekadar contoh, ketika anak menderita batuk dan pilek, maka jangan masuk seko-

lah, melainkan cukup belajar di rumah. Guru harus tegas menolok siswa yang sedang sakit masuk sekolah.

Sementara guru, selain harus disiplin menerapkan prokes, juga harus mengikuti program vaksinasi lengkap atau booster sehingga tidak sakit berat ketika terpapar Covid-19—meski ini tidak kita harapkan. Paling tidak, untuk menggelar PTM 100 persen, guru yang divaksin lengkap jumlahnya harus di atas 75 persen agar relatif aman. Artinya, jangan hanya mendorong siswa untuk divaksin, melainkan juga para guru yang sudah menerima giliran, segera divaksin.

PTM juga harus memperhatikan wilayah tempat sekolah tersebut berada. Kalau kondisinya rawan, misalnya keataatan masyarakat sekitar untuk menegakkan prokes rendah, maka sekolah harus ekstra hati-hati terutama ketika berinteraksi dengan warga sekitar.

Lebih dari itu, guru dituntut kreativitasnya untuk menciptakan sistem belajar mengajar yang adaptif dengan lingkungan serta tak membuat siswa bosan. Disebut-sebut, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diberlakukan selama ini menjadi penyebab menurunnya kualitas pelajar di DIY. Sebenarnya, kalau mau jujur, pembelajaran paling ideal dalam kondisi saat ini adalah kombinasi luring dan daring, tinggal bagaimana guru memainkan perannya agar materi yang disampaikan tidak membosankan.

Kita sepakat PTM 100 seratus persen lebih efektif ketimbang PJJ, namun kita tentu tak boleh mengabaikan faktor kesehatan atau keselamatan siswa, sehingga untuk saat ini kiranya lebih cocok diterapkan pembelajaran dengan sistem kombinasi, meski persentase tatap muka diperbanyak. □

Semangat Baru Pengurus Wilayah NU DIY

SETELAH melalui Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-15 di Pondok Pesantren Al Furqon Bantul (15 Januari lalu), sejumlah warga NU DIY yang telah dipilih dan menyatakan diri berkhidmah di Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tadi malam dilantik di Gedung Multi Purpose UIN Sunan Kalijaga.

Pelantikan menjadi penanda keberlangsungan estafeta kepemimpinan yang dikomandani KH Dr Zuhrul Muhdlor, Aiselaku Ketua Tanfidziyah, Aidan KH Mas'ud Maduqi, Aiselaku Rois Syuriah. Dengan mengusung tema "Memperteguh Sinergi dan Kemandirian Jam'iyah Menuju Kebangkitan Kedua" PWNU mempunyai tanggung jawab teritorial untuk melestarikan sebuah tradisi penguatan jam'iyah (pengurus) dan jamaah (warga) NU di DIY. Keberadaan NU di DIY yang dalam 20 tahun terakhir sudah menunjukkan taji organisatorisnya dengan baik dan mengatur tik tok konsolidasi berjam'iyah antar cabang yang sinergis, tentu harus diperkuat lagi.

Dalam kaitan ini, untuk memperkuat kehadiran NU di tanah Sultan ini, diperlukan kinerja organisatoris yang mengedepankan kecakapan manajerial dalam mengelola ritme kerja dan rumusan kebijakan yang progresif bagi kemajuan PWNU. Sebab, dalam kecakapan manajerial ditandai oleh keberanian melakukan terobosan (*break-through*) dalam menentukan keputusan yang solutif.

Terlebih lagi, di tahun 2026 NU akan memasuki usia satu abad dan ditandai dengan kebangkitan kedua (*an nahdlat ats tsaniyah*). Maka, PWNU yang selama ini menjadi salah satu pandu organisasi NU yang sangat diperhitungkan di kancah nasional, juga membutuhkan konsolidasi organisatoris yang mempunyai kecekatan dalam menjalin kerjasama, baik di tingkat internal maupun eksternal. Setidaknya, melalui langkah ini, PWNU akan mampu mengelola jejaring dengan berbagai pihak dan lintas profesi yang

Fathorrahman Ghufro

bisa berkontribusi pada kebesaran NU.

Mengelola Jejaring

Dalam tata kelola jejaring, tentu membutuhkan ketajaman penciuman dalam menangkap peluang. Berbagai sumber daya manusia NU yang berpotensi menopang penguatan kemandirian NU di DIY, terutama di lingkup ekonomi, perlu diajak ke dalam barisan *khidmah an nahdliyah* untuk memajukan NU. Sebab



ifitas lain harus dikelola sebagai barisan *khidmah an nahdliyah*. Namun, untuk meyakinkan mereka agar mau berkhidmah ke dalam NU tentu diperlukan teknik komunikasi dan lobi sosial yang mumpuni. Setidaknya ada dua langkah untuk mengelola jejaring yang bisa memperkuat PWNU. Pertama, prinsip *mukafaah* (keselarasan posisi atau profesi) merupakan salah satu modal sosial untuk menaikkan derajat NU ketika berhadapan dengan berbagai sumber daya beragam. Setidaknya, ketika pimpinan PWNU berhadapan dengan kaum profesional dan pegiat ekonomi, PWNU tetap diperhitungkan sebagai organisasi bermartabat.

Kedua, prinsip *mubadalah* (keter-salingan peran antar berbagai pihak) merupakan cara berdiplomasi kepada berbagai pihak kelas menengah ke atas, bahwa NU merupakan sarana berkhidmah yang tidak hanya berkaitan dengan penguatan keakhiratan, tetapi penguatan keduniaan adalah keniscayaan yang juga diperhatikan, namun dilapisi dengan kearifan lokal agar tetap bersahaja kepada setiap keadaan dan setiap orang.

Akhirnya, semoga pengurus baru NU DIY mampu hadir sebagai intermediasi jam'iyah dan jamaah yang bisa berkontribusi bagi peradaban dunia yang selaras dengan visi besar PBNU: "Mera-wat Jagat Membangun Peradaban." □

*) **Dr H Fathorrahman Ghufro**.

Wakil Katib Syuriah PWNU Yogyakarta, Dosen UIN Sunan Kalijaga.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

'Reshuffle' UU Pendidikan

Nurul Huda SA

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Pendidikan Nasional telah disiapkan tim Kementerian Pendidikan Nasional, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek). RUU baru yang disiapkan ini untuk mengganti 3 UU yang terkait dengan pendidikan; UU nomor 20 tahun 2003 (tentang Sistem Pendidikan Nasional), UU nomor 14 tahun 2005 (tentang guru dan dosen), dan UU nomor 12 tahun 2012 (tentang Pendidikan tinggi).

Secara normatif, tentu argumen utama pentingnya perubahan UU karena UU yang ada dinilai tidak lagi mencukupi kebutuhan, tantangan zaman, dan masa depan kehidupan yang kian kompleks.

Penulis memiliki tiga catatan utama; Pertama, beberapa pasal dalam UU nomor 20 tahun 2003 telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya pasal tentang kewajiban pemerintah memenuhi anggaran 20 persen dari APBN tidak termasuk gaji guru dan pasal tentang Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).

Kedua, lahirnya UU nomor 14 tahun 2005 membuat pasal-pasal yang terkait dengan guru dalam UU nomor 20 tahun 2003 menjadi tidak relevan, terabaikan, atau tidak lagi berguna. Aturan-aturan tentang guru yang dalam UU nomor 20 tahun 2003 dijelaskan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan seterusnya, menjadi absurd karena yang terjadi malah lahir UU 14 tahun 2005.

Ketiga, setelah MK memutuskan bahwa UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Dasar, ternyata aturan per-guruan tinggi (yang sudah di-BHP oleh pemerintah) tidak dikembalikan pada UU nomor 20 tahun 2003, tetapi disambut dengan lahirnya UU 12 tahun 2012. Dengan UU baru ini maka pasal-pasal tentang per-guruan tinggi dalam UU nomor 20 tahun 2003 dengan sendirinya mati atau mati

suri. Karena aturan-aturan tentang per-guruan tinggi yang dalam UU nomor 20 tahun 2003 dijelaskan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan seterusnya, menjadi tak pernah ada. Sejak lahirnya UU 12 tahun 2012, perguruan tinggi hampir-hampir tidak lagi merujuk pada UU nomor 20 tahun 2003.

Inilah bukti bahwa ada UU seputar pendidikan yang saling menjatuhkan dan menggembosi. Namun kenyataan ini penulis pahami sebagai konsekuensi logis gelombang perubahan pasca lengsernya Soeharto tahun 1998, dan akibat adanya kebijakan yang tidak tepat sehingga memaksa lahirnya UU baru.

Kini, sejak reformasi 1998, hampir 25 tahun terjalani. Benar, sudah waktunya membangun kembali pendidikan nasional pada jalan khittah yang substansial. Salah satunya dengan melihat kembali beragamnya UU yang terkait pendidikan, untuk dirumuskan lagi supaya menjadi UU Sistem Pendidikan Nasional yang utuh. Pemerintah telah menjalankan tugas-tanggung jawab dan mengambil inisiatif.

Sekitar setahun lalu, kabar akan adanya 'perbaikan' UU Sistem pendidikan nasional telah terdengar, sayup-sayup. Setelah itu hampir tidak ada kabarnya. Namun di awal 2022 ternyata Kemendikbudristek telah mengadakan 4 kali uji publik. Penulis memaklumi keterkejutan publik ini, karena secara substansial mengkaji dan merumuskan UU baru dari 3 UU yang telah ada bukanlah pekerjaan enteng. Butuh energi besar dan melibatkan sebanyak mungkin para pihak. Terbukti, setelah dilakukan uji publik banyak pihak protes, merasa

ditinggalkan, tak diajak rembugan sama sekali. Kenyataan ini seakan membuktikan tuduhan bahwa RUU pendidikan tidak disiapkan secara matang, baik secara substansial (isi) maupun teknikal (tergesa-gesa). Penulis sepakat dengan UU Pendidikan 'satu atap,' tetapi hendaknya Kemendikbudristek dikuti belajar dari tragedi Omnibus law atau UU No 12 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada akhirnya hanya melahirkan PR besar. Bukankah pelajaran teramat berharga bahwa dalam beberapa kasus judicial review di Mahkamah Konstitusi, UU yang di gawangan Kementerian Pendidikan selalu kalah? Jika merujuk pada tradisi pergantian menteri di tengah jalan dalam kabinet, maka perlu waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle UU Pendidikan. Apalagi ini upaya reshuffle 3 undang-undang sekaligus. □

*) **Nurul Huda SA**. Pendidik, tinggal di Bantul.

Pojok KR

Bekali disabilitas komunikasi tentang risiko Covid-19.
- **Karena Covid-19 tak mengenal status apapun.**

APPI tolak RUU Sisdiknas masuk Prolegnas.

-- **Tak perlu tergesa, perlu ajak tokoh pendidikan bicara.**

Percepatan graduasi PKM PKH, diduga ada oknum perdes menghambat.
-- **Mestinya diproses hukum.**

Berabs

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Menyongsong Ramadan di Triharjo Bantul

SEPERTI kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, menyongsong bulan suci Ramadan banyak masjid bersih-bersih menghias diri. Demikian juga masjid di dusun Triharjo, Pandak Bantul. Di masjid yang baru saja dibangun ini masih dalam penyempurnaan, sehingga warga antusias membersihkan arena masjid.

setempat yang sangat antusias kerja bakti gotong royong untuk membuat masjid yang diprakarsai KH Heni Sutopo ini menjadi lebih indah, mulai pemasangan keramik sampai memasang tirai pembatas untuk jamaah wanita dan pria. Indahnya bulan Ramadan yang penuh sinar kemuliaan. □

Sulasri, MTSn 8 Bantul.

Sambut Ramadan, Bentengi Provokasi

SEBENTAR lagi kita melangkah ke bulan suci Ramadan. Kita perlu menyatukan siap, lebih fokus beribadah. Karena itu perlu didukung ajakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Aktivistis Masjid (FKAM) se DIY untuk menjaga toleransi, membentengi dari provokasi dari manapun.

Maka akan sangat indah, jika nanti terjadi kesamaan pandangan yang lurus dan benar antara pemerintah dan masyarakat mengenai toleransi dan keadilan. Dan kepada takmir masjid ikut aktif membangun opini yang positif, agar suasana umat tetap kondusif. □

H Sumardiyono, Sinduadi, Mlati, Sleman.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Toha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito Mpd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)